



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

- Nama** : USMAN BANGUN
- Jabatan** : VICE PRESIDENT EFISIENSI, KUALITAS DAN PENGUKURAN DISTRIBUSI
SULAWESI, MALUKU, PAPUA, DAN NUSA TENGGARA
- NHK** : 203979

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.177.144.000**

- Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 216.972.000
- Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 216.972.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/117 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.293.300.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/36 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 193.900.000
- Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KARO, HASIL SENDIRI Rp. 136.000.000
- Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA KARO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **434.125.000**

- MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOTOR, YAMAHA SOUL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
- MOBIL, HONDA CRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 427.125.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	592.860.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.351.547.354
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.555.676.354
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.555.676.354

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.